

2. Penguatan Kapasitas internal anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota serta penyiapan sumber daya pelaksana guna mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II," 2006.
- Budiardjo, Mariam, and Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Krina, Loina Lalolo, and Loina Lalolo. "Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi." *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2003.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- mas oed, Mohtar. *Politik, Birokrasi Dan Pembangunan*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008.
- Moenta, Andi Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." *UI-Press*, 2010.
- Suaib, Suaib. "Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah." *Jurnal Katalogis* 5, no. 7 (2017): 2019–2302.
- Syaukani, H R, A Gaffar, and M R Rasyid. "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan [Regional Autonomy in the Unitary State]." *Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar [Dan] Pusat Pengkajian Etika Politik Dan Pemerintahan*, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan, and M H Sh. *Konstruksi Hukum Tata Negara*

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Prenada Media, 2016.

Jurnal

- Baskoro, T. “Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(Studi Pada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang).” *Skripsi, Tidak Diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang*, 2005.
- Muwaroh, Nunung. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik *Good governance* Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.” *Jurnal Media Birokrasi*, 2019, 142–56.
- Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-Prinsip *Good governance* Di Indonesia.” *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40–52.
- Sanit, Arbi. “Perwakilan Politik Di Indonesia.” (*No Title*), 1985.
- Simangunsong, Bonar, and Daulat Sinuraya. “Negara, Demokrasi Dan Berpolitik Yang Profesional.” (*No Title*), 2004.
- Simarmata, Jorawati. “Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)(Political Law of Post-Reformation Local Government Officers Restructuring/Formin.” *Legislasi Indonesia* 13 (2016): 347–58.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 149 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 316 ayat (1).

PP No. 12 Tahun 2018 & Permendagri 80/2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (1) huruf b.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (1) huruf c.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 109–121.

Berita dan Lain-Lain

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, “Beranda,” diakses 10 Agustus 2025, <http://dprd.magelangkota.go.id/>.

Pemerintah Kota Magelang, Sekretariat DPRD Kota Magelang, 2024, <https://magelangkota.go.id/page/sekretariat-dprd> , diakses 24 Agustus 2025.

Suara Merdeka. (2024, September 4). Tahun 2025 Pemkot Magelang angkat tema pembangunan Pemantapan untuk Maju, Sehat, dan Bahagia. Suara Merdeka Kedu. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2113104883/tahun-2025-pemkot-magelang-angkat-tema-pembangunan-pemantapan-untuk-maju-sehat-dan-bahagia>

Warta Magelang. (2024, November 27). DPRD Kota Magelang dan Pemkot Magelang setuju bersama APBD 2025. Warta Magelang.

<https://wartamagelang.com/dprd-kota-magelang-dan-pemkot-magelang-setujui-bersama-apbd-2025.html>

Radar Jogja. (2024, Agustus 15). Pemkot Magelang lakukan penggeseran anggaran untuk tujuh prioritas utama. Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/656102887/pemkot-magelang-lakukan-penggeseran-anggaran-untuk-tujuh-prioritas-utama>

Instagram DPRD Kota Magelang. (2025, Agustus 8). Rapat Banggar bersama TAPD membahas realisasi dan penjabaran APBD 2025 [Photo]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DNYKXQ7J3Fw>

JDIH Provinsi Jawa Tengah. (2025, Juli 10). Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/231 Tahun 2025 tentang Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024.

https://jdih.jatengprov.go.id/produk_hukum/kepgub/sk_100.3.3.1-231_th_2025_auten.pdf

Evin Septa Haryanto Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, wawancara pribadi, Magelang